

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Peran Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Tekanan Demografis

Karolina Donata Dhei¹, Yohanes Leontinus Juninho Paokuma²

^{1,2}Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-Mail Corresponding: karolinadonata14@gmail.com

Artikel Info

Arikel History:

Revised 26 Mei 2026

Accepted 18 Juni 2026

Published 20 Juni 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda melalui uji simultan dan uji parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara parsial, hanya Laju Pertumbuhan Penduduk yang berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bersifat multidimensional dan tidak hanya ditentukan oleh partisipasi kerja atau capaian pembangunan manusia, tetapi juga oleh dinamika kependudukan dan kemampuan daerah mengelola potensi penduduk. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada penciptaan pekerjaan layak, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemerataan layanan dasar, dan pengelolaan pertumbuhan penduduk sebagai modal pembangunan daerah.

Kata Kunci: Kemiskinan; Pembangunan Manusia; Partisipasi Angkatan Kerja; Pertumbuhan Penduduk; Nusa Tenggara Timur.

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Labor Force Participation Rate, Human Development Index, and Population Growth Rate on the Poverty Rate of regencies/cities in East Nusa Tenggara Province. The study uses an associative quantitative approach with secondary data obtained from official publications of the Central Statistics Agency. The data analysis technique employs multiple linear regression through simultaneous and partial tests. The results show that the Labor Force Participation Rate, Human Development Index, and Population Growth Rate simultaneously have a significant effect on the Poverty Rate. Partially, only the Population Growth Rate has a negative and significant effect, while the Labor Force Participation Rate and Human Development Index do not have a significant effect. These findings indicate that poverty in East Nusa Tenggara is multidimensional and is not only determined by labor participation or human development achievements, but also by population dynamics and the region's ability to manage its population potential. Therefore, poverty alleviation policies need to be directed toward creating decent jobs, increasing labor productivity, equalizing basic services, and managing population growth as a foundation for regional development.

Keywords: Poverty; Human Development; Labor Force Participation; Population Growth; Nusa Tenggara Timur

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan rendahnya taraf hidup masyarakat, tetapi juga menjadi indikator belum optimalnya proses pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan dipahami sebagai kondisi multidimensional yang tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, melainkan juga menyentuh aspek rendahnya kualitas sumber daya manusia, sempitnya akses terhadap pekerjaan yang produktif, lemahnya daya beli rumah tangga, serta tekanan demografis yang terus menguat (World Bank, 2022). Oleh karena itu, upaya memahami dan mengurai akar penyebab kemiskinan secara empiris menjadi langkah penting dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Di tingkat global, kemiskinan telah menjadi agenda prioritas pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pertama yang mendorong penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Di Indonesia, berbagai intervensi kebijakan telah dilaksanakan, mulai dari program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan, hingga perluasan layanan kesehatan. Meskipun demikian, capaian pengentasan kemiskinan antarprovinsi masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. NTT menjadi salah satu provinsi yang secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di NTT pada September 2025 tercatat sebesar 17,50 persen atau setara dengan sekitar 1,03 juta jiwa, meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2025 dan September 2024 (BPS Provinsi NTT, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan di NTT membutuhkan analisis yang lebih mendalam, terutama pada tingkat kabupaten/kota, mengingat perbedaan karakteristik wilayah yang sangat beragam.

Salah satu faktor yang secara luas diyakini memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan adalah kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak tiga prasyarat mendasar yang menentukan produktivitas, kapasitas ekonomi, dan kemampuan individu untuk keluar dari jebakan kemiskinan (UNDP, 2022). Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia di suatu daerah, semakin besar peluang masyarakatnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya, rendahnya indeks pembangunan manusia dapat memperlemah kemampuan masyarakat dalam mengakses kesempatan ekonomi yang lebih produktif, sehingga memperlebar risiko kemiskinan (Hayati, 2025; Arianto, 2025). Dalam konteks NTT, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi NTT pada tahun 2025 mencapai 69,89 meningkat sebesar 0,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas hidup di seluruh kabupaten/kota (BPS Provinsi NTT, 2025). Perbedaan capaian IPM antarwilayah ini menjadikan variabel pembangunan manusia sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks kemiskinan daerah.

Selain pembangunan manusia, kondisi ketenagakerjaan khususnya pengangguran turut berperan penting dalam membentuk tingkat kemiskinan suatu wilayah. Pengangguran secara langsung berdampak pada hilangnya sumber pendapatan keluarga, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya ketergantungan ekonomi, serta semakin rentannya rumah tangga terhadap kondisi kemiskinan (Todaro & Smith, 2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT pada Februari 2025 tercatat sebesar 3,23 persen, naik tipis 0,06 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (BPS Provinsi NTT, 2025). Angka ini mungkin terlihat tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa wilayah perkotaan besar di Indonesia, namun persoalan ketenagakerjaan di NTT sesungguhnya lebih kompleks ditandai oleh dominasi sektor informal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, meluasnya fenomena setengah pengangguran, dan terbatasnya lapangan kerja yang bersifat produktif. Beberapa penelitian terbaru memperkuat relevansi pengangguran sebagai determinan kemiskinan: Malida dan Sumanto (2024) menemukan bahwa TPT berpengaruh terhadap kemiskinan karena pengangguran menggerus kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; Riyandini (2024) menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran berisiko memperbesar kemiskinan, khususnya bila tidak disertai perlindungan sosial yang memadai; sementara Gai (2025) menemukan bahwa TPT, pertumbuhan ekonomi, dan IPM secara bersama-sama membentuk pola kemiskinan daerah.

Di sisi lain, dinamika kependudukan turut berkontribusi dalam membentuk kondisi kemiskinan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, apabila tidak diimbangi dengan kapasitas ekonomi daerah dan ketersediaan layanan dasar yang memadai, dapat meningkatkan beban tanggungan keluarga, menekan pasar kerja, memperbesar kebutuhan akan layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperluas kerentanan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini, tekanan demografis direpresentasikan melalui laju pertumbuhan penduduk sebagai variabel yang mencerminkan dinamika populasi di tingkat kabupaten/kota. Beberapa studi mendukung relevansi variabel ini: Febila (2024) menemukan bahwa jumlah penduduk, IPM, dan TPT secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia; Davala (2024) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor penjelas yang signifikan dalam variasi kemiskinan antarwilayah di Pulau Sumatera;

dan Arianti (2025) menegaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial-ekonomi dan demografis, sehingga analisis kemiskinan tidak dapat berfokus hanya pada satu indikator tunggal.

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa determinan kemiskinan telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Hasanah (2024) menemukan bahwa IPM, rata-rata lama sekolah, TPT, dan upah minimum merupakan faktor-faktor kunci dalam menjelaskan kemiskinan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setya (2024) juga menunjukkan bahwa IPM, rasio gini, TPT, dan upah minimum relevan dalam menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin di wilayah yang sama. Arianto (2025) menegaskan bahwa meskipun pembangunan manusia dan ketenagakerjaan secara konsisten muncul sebagai faktor penting, pengaruhnya bisa berbeda-beda bergantung pada karakteristik wilayah, struktur ekonomi lokal, dan kapasitas kebijakan daerah. Dari perspektif NTT sendiri, Utari (2024) menemukan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan memainkan peran strategis dalam menekan kemiskinan di wilayah Sumba. Temuan-temuan ini secara kolektif memperkuat argumen bahwa analisis kemiskinan perlu dilakukan secara kontekstual, disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah yang diteliti.

Meski demikian, sejumlah kesenjangan penelitian masih perlu diisi. Pertama, sebagian besar kajian yang ada dilakukan pada tingkat nasional, antarprovins, atau wilayah-wilayah di luar NTT, sementara analisis yang secara khusus menyoroti kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTT masih terbatas. Kedua, banyak penelitian yang menggunakan jumlah penduduk absolut sebagai variabel demografis, namun belum banyak yang secara eksplisit mengangkat laju pertumbuhan penduduk sebagai proksi tekanan demografis dalam menjelaskan dinamika kemiskinan. Ketiga, NTT memiliki karakteristik yang distingtif sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, ketimpangan akses layanan dasar antardaerah, dominasi sektor primer dalam struktur ekonomi, dan perbedaan capaian pembangunan yang cukup lebar antarkabupaten/kota sehingga temuan dari wilayah lain tidak serta-merta dapat digeneralisasikan ke konteks NTT.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga aspek utama pembangunan manusia, pengangguran, dan tekanan demografis sebagai kerangka analitis untuk memahami kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan, baik secara simultan maupun parsial. Hipotesis yang diajukan adalah: (1) pembangunan manusia, pengangguran, dan tekanan demografis secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT; dan (2) pembangunan manusia, pengangguran, dan tekanan demografis masing-masing berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Secara empiris, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bukti ilmiah mengenai determinan kemiskinan daerah, sekaligus memberikan masukan

kebijakan yang lebih terarah bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja produktif, dan pengelolaan dinamika kependudukan yang lebih berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Penelitian kuantitatif tepat digunakan apabila peneliti ingin mengukur gejala sosial ekonomi secara objektif, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang terukur (Creswell & Creswell, 2023). Jenis penelitian asosiatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga menganalisis pengaruh pembangunan manusia, pengangguran, dan tekanan demografis terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, termasuk arah dan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan unit analisis seluruh kabupaten/kota. Pemilihan Provinsi NTT sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini masih menghadapi tantangan pembangunan berupa kemiskinan yang relatif tinggi, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan kesempatan kerja produktif, serta dinamika kependudukan yang berbeda antarwilayah. Waktu penelitian dilakukan pada tahun penyusunan artikel, sedangkan periode data disesuaikan dengan ketersediaan data sekunder resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dirancang menggunakan data panel, yaitu gabungan antara data runtut waktu dan data silang. Data runtut waktu menggambarkan perkembangan variabel dari tahun ke tahun, sedangkan data silang menggambarkan perbedaan kondisi antar kabupaten/kota di NTT. Penggunaan data panel memberikan keuntungan karena mampu menangkap variasi antarindividu dan antarwaktu secara bersamaan, sehingga hasil estimasi menjadi lebih informatif dan efisien (Baltagi, 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena seluruh kabupaten/kota dijadikan unit analisis, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel jenuh digunakan apabila seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian karena jumlah populasi relatif terbatas dan seluruh unit dianggap penting untuk dianalisis (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, sampel penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT selama periode pengamatan yang datanya tersedia secara lengkap. Apabila penelitian menggunakan 22 kabupaten/kota selama tujuh tahun pengamatan, maka jumlah observasi yang dianalisis adalah 154 observasi. Penggunaan seluruh kabupaten/kota bertujuan agar hasil penelitian

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi kemiskinan antarwilayah di Provinsi NTT.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, yang diukur menggunakan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota. Variabel independen terdiri atas pembangunan manusia, pengangguran, dan tekanan demografis. Pembangunan manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, karena indikator ini mencerminkan capaian dasar pembangunan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pengangguran diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu persentase angkatan kerja yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tekanan demografis diukur menggunakan laju pertumbuhan penduduk, karena indikator ini menggambarkan perubahan jumlah penduduk yang dapat menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Data kemiskinan, IPM, TPT, dan laju pertumbuhan penduduk diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPS kabupaten/kota, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka, Kabupaten/Kota dalam Angka, Statistik Kemiskinan, Statistik Ketenagakerjaan, dan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (BPS Provinsi NTT, 2025; BPS Provinsi NTT, 2026).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan karena data yang dianalisis merupakan data sekunder yang telah tersedia dalam publikasi resmi lembaga pemerintah. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, mencatat, dan mengolah dokumen atau arsip yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar dokumentasi data, yang berfungsi untuk mencatat nama kabupaten/kota, tahun pengamatan, tingkat kemiskinan, IPM, TPT, dan laju pertumbuhan penduduk. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam format panel agar dapat dianalisis berdasarkan dimensi wilayah dan waktu.

Prosedur analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari publikasi resmi BPS, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dalam format panel berdasarkan kabupaten/kota dan tahun pengamatan. Tahap kedua adalah pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki jumlah observasi yang sama. Tahap ketiga adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai pola data sebelum dilakukan analisis inferensial (Ghozali, 2021).

Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian hipotesis melalui uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap kemiskinan, sedangkan uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan memperhatikan arah koefisien, nilai signifikansi, dan kesesuaian hasil dengan teori serta kondisi empiris pembangunan daerah di NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan, sedangkan variabel independennya terdiri atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk. Pengujian dilakukan melalui uji simultan atau uji F untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan, serta uji parsial atau uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil uji simultan atau uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 3,715 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan variasi Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan di NTT tidak hanya berkaitan dengan satu faktor tertentu, tetapi dipengaruhi oleh kombinasi kondisi ketenagakerjaan, kualitas pembangunan manusia, dan dinamika kependudukan.

Tabel 1. Uji Simultan (F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6506984.354	3	2168994.785	3.715	.016 ^b
	Residual	36200884.085	62	583885.227		
	Total	42707868.439	65			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Laju Pertumbuhan Penduduk, IPM, TPAK

Sumber; Hasil Olah Data Spss, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi dari nilai Sum of Squares, diperoleh nilai R Square sebesar 0,390 atau 39 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi Tingkat Kemiskinan dapat

dijelaskan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 39 persen. Sementara itu, sisanya sebesar 61 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti pendapatan per kapita, struktur ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, akses infrastruktur, belanja pemerintah, produktivitas sektor pertanian, akses pendidikan dan kesehatan, serta efektivitas program perlindungan sosial. Rendahnya nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan kabupaten/kota di NTT merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional.

Tabel 2. Uji Parsial (t)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	1961.329	590.759		3.320	.002
	TPAK	.087	.051	.202	1.711	.092
	IPM	-.019	.058	-.039	-.333	.740
	Laju Pertumbuhan Penduduk	-3.768	1.425	-.311	-2.645	.010

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber; Hasil Olah Data Spss, 2026

Secara parsial, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,087 dengan nilai signifikansi sebesar 0,092. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan TPAK cenderung diikuti oleh peningkatan Tingkat Kemiskinan. Namun, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi penduduk dalam pasar kerja belum terbukti secara statistik mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi angkatan kerja belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi NTT, penduduk yang masuk ke pasar kerja tidak selalu terserap dalam pekerjaan formal, produktif, dan berpendapatan layak. Sebagian tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal, sektor pertanian subsisten, pekerjaan keluarga tidak dibayar, atau kegiatan ekonomi berproduktivitas rendah. Oleh karena itu, meskipun seseorang tercatat aktif secara ekonomi, kondisi tersebut belum tentu cukup untuk mengeluarkan rumah tangganya dari kemiskinan. Dengan demikian, persoalan utama ketenagakerjaan di NTT bukan hanya terletak pada jumlah penduduk yang bekerja atau aktif bekerja, tetapi juga pada kualitas pekerjaan, tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan sektor ekonomi daerah dalam menyediakan lapangan kerja layak.

Secara parsial, variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki koefisien regresi sebesar -0,019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,740. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa

peningkatan IPM cenderung menurunkan Tingkat Kemiskinan. Arah hubungan ini sesuai dengan teori pembangunan, karena semakin tinggi kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, maka semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Namun, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tidak signifikannya pengaruh IPM terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia belum secara langsung mampu menjelaskan penurunan kemiskinan antar kabupaten/kota di NTT. Kondisi ini dapat terjadi karena dampak pembangunan manusia terhadap kemiskinan membutuhkan proses yang relatif panjang. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tidak selalu langsung menghasilkan peningkatan pendapatan apabila tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja produktif, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, akses modal usaha, dan penguatan sektor ekonomi daerah. Dengan demikian, IPM yang meningkat belum tentu secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila peningkatan kualitas manusia belum terhubung dengan kesempatan ekonomi yang memadai.

Secara parsial, variabel Laju Pertumbuhan Penduduk memiliki koefisien regresi sebesar -3,768 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk cenderung diikuti oleh penurunan Tingkat Kemiskinan. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar satu satuan akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 3,768 satuan.

Arah pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dalam konteks kabupaten/kota di NTT tidak selalu menjadi beban pembangunan. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi kemungkinan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih dinamis, akses layanan dasar yang lebih baik, dan peluang kerja yang lebih beragam. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk lebih tinggi dapat merupakan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk dalam kondisi tertentu dapat menjadi modal pembangunan apabila penduduk yang bertambah berada pada usia produktif dan mampu terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, secara parsial hanya Laju Pertumbuhan Penduduk yang berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Kemiskinan, sedangkan TPAK dan IPM tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di NTT tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan partisipasi kerja dan pembangunan manusia secara umum, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pekerjaan, pemerataan layanan dasar, penguatan sektor ekonomi produktif, dan pengelolaan dinamika kependudukan sebagai modal pembangunan daerah.

PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki koefisien positif sebesar 0,087 dengan nilai signifikansi 0,092. Meskipun arah koefisien positif ini secara intuitif tampak berlawanan dengan ekspektasi umum, temuan tersebut sesungguhnya dapat dipahami secara logis dalam konteks karakteristik pasar kerja NTT yang masih didominasi sektor informal dan pekerjaan berpendapatan rendah.

Secara teoritis, TPAK hanya mengukur dimensi kuantitas partisipasi penduduk dalam pasar kerja, tanpa mencerminkan apakah penduduk bekerja pada pekerjaan yang formal, produktif, berupah layak, ataupun terlindungi secara sosial (BPS & ILO, 2013). Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa tantangan pembangunan ketenagakerjaan di negara dan daerah berkembang tidak semata-mata terletak pada banyaknya orang yang bekerja, melainkan pada rendahnya produktivitas dan kelangkaan pekerjaan layak. Dalam logika ini, peningkatan TPAK belum tentu berkontribusi pada pengurangan kemiskinan apabila tambahan angkatan kerja yang masuk hanya terserap ke sektor informal, pekerjaan keluarga yang tidak dibayar, pertanian subsisten, atau aktivitas ekonomi berpendapatan marginal.

Konteks kewilayahan NTT memperkuat interpretasi ini. Kabupaten-kabupaten yang memiliki basis ekonomi pertanian, peternakan, dan perikanan subsisten cenderung mencatat TPAK yang relatif tinggi, namun pendapatan yang dihasilkan belum cukup untuk mengangkat rumah tangga keluar dari ambang kemiskinan. Arah koefisien positif ini memberi sinyal adanya fenomena *working poor* — yakni kondisi di mana seseorang aktif bekerja namun tetap miskin karena pekerjaan yang tersedia bersifat musiman, tidak produktif, dan tidak memberikan upah yang memadai (ILO, 2023). Fenomena ini umum dijumpai di wilayah yang belum memiliki pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan diversifikasi sektor yang memadai.

Temuan ini konsisten dengan Malida dan Sumanto (2024) yang menegaskan bahwa pengaruh faktor ketenagakerjaan terhadap kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas pekerjaan dan kapasitas ekonomi daerah. Febila (2024) juga menunjukkan bahwa variabel ketenagakerjaan berinteraksi dengan IPM dan jumlah penduduk dalam menjelaskan kemiskinan, namun kekuatan pengaruhnya dapat berbeda secara

signifikan antarwilayah. Dalam kerangka yang lebih luas, Arianto (2025), Hayati (2025), Gai (2025), dan Hasanah (2024) secara konsisten menemukan bahwa kemiskinan lebih baik dijelaskan oleh kombinasi pembangunan manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi daripada hanya oleh satu ukuran ketenagakerjaan. Ketidaksignifikanan TPAK dalam penelitian ini bukan berarti pasar kerja tidak relevan, melainkan mengindikasikan bahwa TPAK sebagai indikator partisipasi belum mampu menangkap dimensi kualitas pekerjaan, tingkat upah, produktivitas, dan stabilitas pendapatan yang sesungguhnya menentukan kesejahteraan rumah tangga miskin di NTT.

Implikasi kebijakan dari temuan ini mendorong pergeseran orientasi dari sekadar memperluas partisipasi angkatan kerja menuju peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan, mengembangkan UMKM, memperluas perlindungan pekerja informal, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan koefisien negatif sebesar $-0,019$ dengan nilai signifikansi $0,740$. Arah negatif ini selaras dengan prediksi teoritis, di mana peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan. Namun demikian, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, mengindikasikan bahwa peningkatan IPM belum cukup kuat menjelaskan variasi kemiskinan antarkabupaten/kota di NTT dalam kerangka model penelitian ini.

Temuan ini perlu dibaca melalui dua lensa teori yang saling melengkapi: teori modal manusia dan teori kapabilitas. Teori modal manusia menekankan bahwa investasi pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas individu dan pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan. Sementara itu, pendekatan kapabilitas menekankan bahwa pembangunan manusia memperluas kebebasan dan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna secara ekonomi dan sosial. Namun, kedua perspektif ini juga mengakui bahwa manfaat pembangunan manusia tidak bersifat instan diperlukan waktu dan kondisi pendukung agar peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat bertransformasi menjadi produktivitas yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih layak, dan penghasilan yang lebih baik (UNDP, 2022).

Di NTT, ketidaksignifikanan IPM kemungkinan besar berkaitan dengan ketimpangan capaian pembangunan manusia yang masih lebar antarkabupaten/kota. Wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik dapat lebih cepat mengonversi peningkatan IPM menjadi perbaikan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, wilayah kepulauan, perdesaan terpencil, dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar menghadapi proses

konversi yang jauh lebih lambat. Peningkatan IPM pada tataran agregat provinsi pun belum tentu menyentuh kelompok miskin secara langsung apabila akses pendidikan berkualitas, keterampilan kerja, dan peluang usaha masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Hasil ini sejalan dengan temuan Utari (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas investasi pendidikan dan kesehatan dalam menurunkan kemiskinan di wilayah Sumba sangat bergantung pada kualitas belanja publik dan kemampuan program menjangkau kelompok yang paling rentan.

Meskipun berbeda dengan temuan Arianto (2025), Hayati (2025), Gai (2025), Riyandini (2024), dan Setya (2024) yang menemukan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan konteks wilayah, periode data, dan variabel kontrol yang digunakan. Penelitian-penelitian yang menemukan pengaruh IPM lebih kuat pada umumnya dilakukan pada skala antarprovins atau menggunakan kombinasi variabel seperti pengangguran, upah minimum, rasio gini, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kaya. Sementara itu, penelitian Indriyani dan Setiawina (2022) pada konteks wilayah dengan karakteristik serupa juga mencatat bahwa pengaruh IPM terhadap kemiskinan bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh variabel ketenagakerjaan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa di NTT, peningkatan IPM harus berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan kerja produktif, pengembangan sektor ekonomi lokal, dan pemerataan akses layanan dasar agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dapat lebih nyata dirasakan.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini mendorong agar investasi dalam pendidikan dan kesehatan tidak hanya diukur dari capaian indikator agregat, tetapi juga dari relevansinya terhadap kebutuhan ekonomi lokal. Pendidikan vokasi, pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan pengembangan keterampilan berbasis sektor unggulan daerah perlu diperkuat, sehingga peningkatan kualitas manusia dapat segera terhubung dengan pasar kerja dan peluang usaha yang ada di daerah.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan koefisien negatif sebesar -3,768 dengan nilai signifikansi 0,010. Ini merupakan hasil parsial yang paling kuat dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di NTT. Dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan satu satuan laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3,768 satuan.

Temuan ini tampak paradoksal jika dibaca dalam kerangka teori Malthusian yang memandang pertumbuhan penduduk sebagai tekanan terhadap sumber daya dan pemicu kemiskinan. Namun, perspektif yang lebih kontemporer menawarkan pembacaan yang lebih bernuansa. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki dua wajah: ia dapat menjadi beban

pembangunan apabila tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja, pemerataan layanan dasar, dan peningkatan produktivitas; tetapi ia juga dapat menjadi modal pembangunan apabila didominasi oleh penduduk usia produktif yang terampil dan terserap dalam kegiatan ekonomi yang bermakna. Bloom et al. (2003) memperkuat argumen ini melalui konsep demographic dividend, yang menjelaskan bahwa wilayah dengan proporsi penduduk usia kerja yang besar berpotensi memperoleh manfaat ekonomi signifikan apabila mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Dalam konteks NTT, arah negatif koefisien ini paling tepat dimaknai melalui lensa perbedaan fungsi ekonomi antarkabupaten/kota. Daerah-daerah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, transportasi, dan jasa seperti Kota Kupang dan beberapa kota kabupaten umumnya memiliki daya tarik penduduk yang lebih kuat, mencatat laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, dan sekaligus memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena tersedianya lebih banyak peluang ekonomi. Pertambahan penduduk di wilayah semacam ini memperbesar pasar lokal, meningkatkan konsumsi, dan memperkuat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk rendah tidak otomatis memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah kondisi ini justru dapat mencerminkan migrasi keluar penduduk usia produktif, terbatasnya peluang kerja, dan lemahnya pusat pertumbuhan lokal, yang kesemuanya berkontribusi pada persistensi kemiskinan.

Temuan ini memperluas dan sekaligus melengkapi hasil Davala (2024) yang memasukkan aspek pertumbuhan penduduk dalam menjelaskan kemiskinan antarwilayah di Pulau Sumatera, serta Febila (2024) yang menemukan bahwa variabel demografis bersama IPM dan ketenagakerjaan secara bersama-sama membentuk pola kemiskinan provinsi di Indonesia. Jika sebagian kajian memaknai jumlah penduduk yang besar sebagai tekanan terhadap kemiskinan, penelitian ini menunjukkan bahwa di NTT, laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi justru berkaitan dengan kondisi ekonomi yang lebih dinamis. Perbedaan arah temuan ini penting untuk dipahami karena menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada konteks ekonomi, kapasitas penyerapan tenaga kerja, dan kualitas tata kelola pembangunan di masing-masing wilayah.

Namun demikian, temuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati. Arah negatif koefisien tidak boleh dimaknai bahwa pertumbuhan penduduk selalu dan dengan sendirinya mengurangi kemiskinan. Manfaat demografis hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan penduduk disertai dengan penguatan kualitas pendidikan, perluasan akses kesehatan, penciptaan pekerjaan yang layak, dan pengembangan infrastruktur ekonomi yang mendukung. Hasil ini mengisyaratkan perlunya kebijakan yang memanfaatkan potensi penduduk usia produktif secara optimal, antara lain melalui penguatan pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja di luar sektor primer, pemerataan layanan dasar ke wilayah-

wilayah yang tertinggal, dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah perkotaan utama.

Sintesis Temuan dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menghasilkan tiga penegasan penting yang saling melengkapi. *Pertama*, TPAK yang tidak signifikan memperkuat argumen bahwa kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak penduduk yang aktif bekerja, melainkan oleh kualitas pekerjaan, tingkat upah, dan kemampuan sektor ekonomi lokal dalam menyerap tenaga kerja secara produktif (Malida & Sumanto, 2024; Febila, 2024). *Kedua*, koefisien IPM yang negatif namun tidak signifikan memperkuat pemahaman bahwa pembangunan manusia merupakan faktor penting secara teoritis, tetapi di NTT pengaruhnya belum cukup kuat karena peningkatan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya dikonversi menjadi produktivitas, pekerjaan layak, dan pendapatan yang lebih tinggi terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi kendala akses dan keterbatasan infrastruktur ekonomi (Arianto, 2025; Hayati, 2025; Gai, 2025). *Ketiga*, signifikannya laju pertumbuhan penduduk memperlihatkan bahwa dinamika demografis dapat menjadi aset pembangunan, bukan sekadar beban, apabila berlangsung pada wilayah dengan ekonomi yang tumbuh dan layanan dasar yang memadai (Davala, 2024; Bloom et al., 2003; Todaro & Smith, 2020).

Dari perspektif kebijakan, temuan-temuan ini secara kolektif menuntut pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan berbasis karakteristik wilayah. Bagi kabupaten dengan basis ekonomi pertanian dan peternakan, kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan rantai pasok, dan perbaikan infrastruktur produksi. Bagi wilayah kepulauan yang terisolasi secara geografis, intervensi dalam konektivitas transportasi, pengurangan biaya logistik, dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal menjadi prioritas. Sementara itu, wilayah perkotaan dan pusat jasa perlu mempercepat pengembangan sektor formal, ekonomi digital, dan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Pendekatan *one-size-fits-all* dalam pengentasan kemiskinan NTT tidak cukup memadai; yang dibutuhkan adalah kebijakan yang responsif terhadap keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan demografis masing-masing kabupaten/kota.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTT tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh keterkaitan antara kondisi ketenagakerjaan, kualitas pembangunan manusia, dan

dinamika kependudukan. Namun, secara parsial hanya Laju Pertumbuhan Penduduk yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan.

Tidak signifikannya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang aktif dalam pasar kerja belum tentu mampu menurunkan kemiskinan apabila pekerjaan yang tersedia masih didominasi oleh sektor informal, berproduktivitas rendah, dan belum memberikan pendapatan layak. Sementara itu, tidak signifikannya Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup belum secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan apabila tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, pengaruh negatif signifikan Laju Pertumbuhan Penduduk mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di beberapa kabupaten/kota NTT dapat menjadi potensi pembangunan apabila didominasi oleh penduduk usia produktif dan didukung oleh aktivitas ekonomi yang lebih dinamis.

Secara empiris, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan bahwa kemiskinan kabupaten/kota di NTT perlu dipahami melalui pendekatan multidimensional, bukan hanya dari sisi ketenagakerjaan atau pembangunan manusia secara umum. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pekerjaan, penguatan sektor ekonomi produktif, pemerataan layanan dasar, serta pengelolaan dinamika penduduk sebagai modal pembangunan daerah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel yang masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan kompleksitas kemiskinan di NTT. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti PDRB per kapita, belanja pemerintah, tingkat pendidikan, akses infrastruktur, ketimpangan pendapatan, produktivitas sektor pertanian, dan pekerja informal agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, E., & Cahyono, H. (2025). The effect of human development index and unemployment on poverty in Indonesia 2018–2023. *Finance: International Journal of Management Finance*, 2(4), 59–64. <https://doi.org/10.62017/finance.v2i4.83>
- Arianti, R. A., Ihwal, M., Laome, L., & Ampa, A. T. (2025). Pemodelan regresi berganda pada jumlah penduduk miskin di Indonesia. *Arus Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.57250/ajst.v3i1.1445>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025, May 5). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 3,23 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding pada Februari 2024*. <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1426/tingkat-pengangguran->

[terbuka--tpt--pada-februari-2025-sebesar-3-23-persen--naik-sebesar-0-06-persen-poin-dibanding-pada-februari-2024.html](#)

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025*. <https://ntt.bps.go.id/id/publication/2026/04/24/f7700b50387f1f8807723b4d/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-nusa-tenggara-timur-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026). *Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025*. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw%3D%3D/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur--2025.html?year=2025>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026). *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam angka 2026*. <https://ntt.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/d993a1b107b4d07b54afb390/provinsi-nusa-tenggara-timur-dalam-angka-2026.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen, menurun 1,10 persen poin terhadap Maret 2025*. <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1477/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2025-sebesar-17-50-persen--menurun-1-10-persen-poin-terhadap-maret-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026). *Ringkasan data dan informasi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025*. <https://ntt.bps.go.id/id/publication/2026/03/16/34f3818c41bb1590087f8d2a/ringkasan-data-dan-informasi-kemiskinan-provinsi-nusa-tenggara-timur-2025.html>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Davala, M. R., Annisa, N. M., Siswanto, S., & Kalondeng, A. (2024). Pemodelan data kemiskinan di Pulau Sumatera dengan regresi multilevel spline linear truncated. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.13057/ijas.v7i1.80768>
- Gai, A. M., Sir, M. M., Paru, M. A., & Aryunto, P. (2025). The influence of economic growth, human development index, and open unemployment rate on poverty levels in Sumenep Regency. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 8(2), 3862–3882. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i2.6770>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N. N., & Priyadi, U. (2024). Analysis of the factors that influence poverty in the districts/cities of Yogyakarta Special Region. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 24(1), 34–43. <https://doi.org/10.20961/jjep.v24i1.83365>
- Hayati, N., & Chandriyanti, I. (2025). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 218–230. <https://doi.org/10.20527/jjep.v8i1.616>

- Nadhi, I. M. A., Hudang, A. K., & Renggo, Y. R. (2025). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya bagi kemiskinan di Sumba. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 25(1), 37–47. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v25i1.25194>
- Riyandini, S. (2024). Analisis pengaruh IPM, upah minimum, TPT dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017–2022. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1270–1285. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.23>
- Sari, L. P., Nurjannah, N., & Yovita, I. (2022). Analisis pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2002–2021. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 567–574. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.721>
- Setya, M. R. T., & Tohirin, A. (2025). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014–2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 227–234. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art13>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utari, Y., & Sumanto, A. (2024). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan tahun 2018–2022. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(1), 102–112. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.16250>